

ABSTRAK

Penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim, mengakui adanya sanksi pidana mati yang layak diterapkan bagi pelaku kejahatan yang sangat berbahaya dan mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem hukum islam yang sangat efektif memberantas kejahatan dan adil bagi para korbannya. Di dalam al-Qur'an pun dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi kejahatan-kejahatan yang merusak lima hal pokok kemaslahatan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), seperti pembunuhan, zina dan gangguan keamanan.

Hukuman mati di dalam hukum positif merupakan salah satu hukuman pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, sehingga hukuman mati sangat perlu untuk diterapkan bagi kejahatan-kejahatan besar yang sifatnya mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara. Selain itu hukuman mati juga diatur didalam undang-undang mengenai tindak pidana khusus, salah satu contohnya adalah tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap peradaban dan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Karena kejahatan terorisme ini dilakukan dengan cara-cara anarkis yang banyak mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Maka untuk dapat menghentikan kejahatan ini diperlukan suatu hukuman yang dapat membuat jera para pelaku teroris tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti buku-buku atau jurnal dan kitab-kitab yang membahas tentang hukuman mati dan terorisme.

Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menggali norma hukum di dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan KUHP, lalu dikaji dari sudut pandang fiqh jinayah melalui dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist.

Jenis skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mencoba mendeskripsikan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003, kemudian dianalisa melalui pendekatan fiqh jinayah sehingga dapat ditarik kesimpulan umum.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa sanksi pidana mati bagi teroris yang diatur di dalam UU N. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran islam. Dan kejahatan terorisme dapat dikategorikan kedalam *jarīmah hudūd* yang di *qiyās* kan dengan *jarīmah hirābah* dan patut bagi pelakunya dijatuhi hukuman mati, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah : 33.

Kata kunci : hukuman mati, terorisme, UU No. 15 Tahun 2003, fiqh jinayah.

ABSTRACT

Indonesia's population is mostly Muslim, recognized the dead a decent criminal sanctions applied to offenders who are very dangerous and disturbing security and order of the country. The death penalty is a form of punishment in the Islamic legal system very effectively combating crime and justice for the victims. In the Koran it was explained that the death penalty can be applied to crimes that destroy human benefit five main topics (religion, life, intellect, lineage, wealth), such as murder, adultery and security disturbances.

The death penalty in the positive law is one of the principal penalties listed in Article 10 of the Criminal Code, so that the death penalty is very necessary to be applied to major crimes that are disruptive and detrimental to society and the state. Besides the death penalty is also regulated under the laws of the particular criminal offense, one example is the criminal act of terrorism. Terrorism is a crime against civilization and one of the serious threats to the sovereignty of each country. Because of terrorist crimes is done in ways that many anarchists sacrificing the lives of innocent people. So to be able to stop this crime requires a punishment that can deter the perpetrators of such terrorist.

This thesis is a research literature, namely by examining the books or journals and books that discuss about the death penalty and terrorism.

This thesis uses the normative legal approach, by exploring the legal norms in Law No. 15 of 2003 and the Criminal Code, and then examined from the viewpoint of fiqh jinayah through the arguments of the Koran and Hadith.

Type this thesis is descriptive, is to try to describe settings criminal acts of terrorism in the Act No. 15 of 2003, and then analyzed through the approach of fiqh jinayah so that general conclusions can be drawn.

Results from this study stated that sanctions the death penalty for terrorists who set in N. Law 15 of 2003 on the eradication of terrorism is not at all contradictory to the teachings of Islam. Terrorism and crime can be categorized into jarimah hudud in Qiyas right with jarimah hirabah and worthy of the perpetrators were sentenced to death, as described in the Qur'an Surah al-Maidah: 33.

Keywords: death penalty, terrorism, Law 15 of 2003, fiqh jinayah.